# KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah sebagai pengelola anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Kabupaten Semarang mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor *PER-24/PB/2006*  tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Ungaran,31 Desember 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN,

DAN PANGAN

KABUPATEN SEMARANG

**Ir. Wigati Sunu, MBA**

Pembina Utama Muda

NIP 196401061991031006

**D A F T A R I S I**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

**BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAK TARGET**

**KINERJA APBD**

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Kondisi Geografis

2.1.2 Kondisi Demografis

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Pendapatan Daerah

2.2.2 Belanja Daerah

2.2.3 Strategi dan Prioritas

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

**BAB III IKHTISAR CAPAIAN**

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

3.2Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang

telah ditetapkan

**BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Mengikuti/menyesuaikan Kebijakan akuntansi Pemda

**BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

(menyesuaikan data LRA yang ada di SKPD)

5.1 Pendapatan

5.1.1 Pendapatan Asli Daerah

5.2 Belanja

5.2.1 Belanja Operasional

5.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Tak Langsung

Belanja Langsung

5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.2 Belanja Modal

5.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5.2.2.4 Belanja Aset Tetap Lainnya

**PENJELASAN POS POS NERACA (Menyesuaikan Data di Neraca SKPD)**

5.2.1 ASET

5.2.1.1 Aset Lancar

5.2.1.2 Aset Tetap

5.2.1.3 aset Lainnya

5.2.2 KEWAJIBAN

5.2.2 Kewajiban Jangka Pendek

5.2.3 EKUITAS

**PENJELASAN POS LO**

8 PENDAPATAN

8.1 PENDAPATAN ASLI

8.3 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

8.4 SURPLUS NON OPERASIONAL

9 BEBAN

9.1 Beban Pegawai

9.2 Beban Barang dan Jasa

9.5 Beban Hibah

9.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

9.9 Beban Lain Lain

**PENJELASAN POS LPE**

**BAB VI PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN**

6.1 ORGANISASI

6.2 STRUKTUR KEPEGAWAIAN/SDM

**BAB VII PENUTUP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DAFTAR LAMPIRAN :**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lampiran A | **:** | Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2020 | | Lampiran B | **:** | Rekapitulasi Realisasi Belanja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 | | Lampiran C | **:** | Rekap Setor Kembali/ CP / Contra Post Tahun Anggaran 2020 | | Lampiran D | **:** | Daftar Pengadaan Barang 2020 (Khusus Yang Menambah Aset Neraca) | | Lampiran E | **:** | Selisih Penambahan Aset Dengan Realisasi Belanja Modal Per 31 Des 2020 | | Lampiran F | **:** | Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Per 31 Desember 2020 | | Lampiran G | **:** | Laporan Persediaan Per 31 Desember 2020 | | Lampiran H | **:** | Laporan Pengelolaan Dana Bergulir Per 31 Desember 2020 | | Lampiran I | **:** | Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah Per 31 Desember 2020 | | Lampiran J | **:** | Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Laporan Rugi/Laba | | Lampiran K | **:** | Ihktisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Per 31 Desember 2020 | | Lampiran L | **:** | Daftar Piutang Daerah Per 31 Desember 2020 | | Lampiran M | **:** | Daftar Utang Daerah per 31 Desember 2020 | | Lampiran N | **:** | Daftar Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2020 | | Lampiran O | **:** | Daftar sisa kas Bendahara Penerimaan Tahun 2020 | | Lampiran P | **:** | Daftar Sisa Kas Selain Kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahar Penerimaan | | Lampiran Q | **:** | Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2020 | | Lampiran R | **:** | Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2020 | | Lampiran S | **:** | Laporan atas dana yang ada dalam APBD tetapi tidak melalui kas daerah | | Lampiran T | **:** | Rekapitulasi Laporan Realisasi Pelaksaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa | | Lampiran U | **:** | Rekapitulasi Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember 2020 |   **Lampiran Pendukung CALK** |
| Neraca Aset Per 31 Desember 2020  Laporan Mutasi Aset Hewan Per 31 Desember 2020  Laporan Mutasi Persediaan Hewan/ Ikan Per 31 Desember 2020 |

Ungaran, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan

Kabupaten Semarang

Selaku

Pengguna Anggaran

**Ir. Wigati Sunu, MBA**

Pembina Utama Muda

NIP 196401061991031006

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Laporan Keuangan berupa Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laoporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, gNeraca, LO dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019.

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode laporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan , menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan.

**Tujuan Pelaporan Keuangan :**

1. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang undangan
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil – hasil yang telah dicapai
3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan – tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.

**1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang mengatur Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual ;
3. Peraturan Bupati Semarang Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang ;
4. Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang;
5. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019.

Bahwa setiap OPD harus menyusun pelaporan dengan cara melakukan konversi/penyesuaian laporan keuangan dari format lama ke format baru sebagaimana diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 maupun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 64 Tahun 2013, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan Laporan Keuangan lainya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LO dan LPE. Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, Kabupaten Semarang dalam penyusunan Laporan Keuangan sesuai format yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 64 Tahun 2013 tersebut. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang yang tak terpisahkan dari kesatuan Laporan Keuangan lainya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagai bentuk pertanggung jawaban Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang selaku Pengguna Anggaran.

**1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

**Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Tahun Anggaran 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bab | I. | Pendahuluan  Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum serta sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). |
| Bab | II. | Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD  Memuat ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD. |
| Bab | III. | Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan  Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan/kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. |
| Bab | IV. | Kebijakan Akuntansi  Memuat entitas akuntansi keuangan daerah, basis akuntansi, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketetentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. |
| Bab | V. | Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan   1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 2. Penjelasan pos-pos Neraca 3. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional 4. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas |
| Bab | VI. | Pengungkapan Lainnya, Informasi Non Keuangan  Memuat rincian tentang profil Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang. |
| Bab | VII. | Penutup |

**BAB II**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN**

**TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

2.1.1 Kondisi Geografis

Luas Kabupaten Semarang secara keseluruhan sebesar 95.020,67 Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah, secara administratif terdiri dari 19 wilayah kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Kabupaten Semarang letaknya diuntungkan secara geografis, mengingat posisinya yang strategis terletak diantara jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah DIY, Solo dan Semarang ( Joglosemar ). Posisi startegis tersebut merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah.

Kabupaten Semarang secara geografis berbatasan dengan batas administratif sebagai berikut ;

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Semarang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang
5. Di tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga.

2.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan data Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada akhir 2018 tercatata sebanyak 1.022.423 jiwa yang terdiri dari 512.269 laki laki dan 510.154 perempuan. Jumlah penduduk ini dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar 1.011.635 jiwa terdapat kenaikan sebanyak 10.788 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebanyak 0,53%. Adapun jumlah Kepala Keluarga dari 322.603 KK pada tahun 2017 bertambah menjadi 332.024 KK pada tahun 2018, atau mengalami kenaikan sebanyak 9.421 KK

Jika dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Semarang pada akhir tahun 2018, maka Kecamatan Ungaran Barat merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yakni sebanyak 77.812 jiwa, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Bancak yakni sebanyak 24.258 jiwa.

Untuk kepadatan penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2017 rata-rata sebesar 1.064,64 jiwa/km2, sedangkan pada akhir tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 2.187,57 jiwa/km2, dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Ambarawa yakni sebesar2.208,01 jiwa/km2, sedangkan kepadatan penduduk yang terendah ada di Kecamatan Bancak sebesar 553,20 jiwa/km2.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang pada Tahun 2018 sebanyak 5,79%, terjadi peningkatan sebesar 0,24% bila dibandingkan Tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2018 jika dibandingkan dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota sekitar masih lebih tinggi namun lebih rendah dari Kota Semarang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2018 sebesar 5,32% dan Nasional 2,80% lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,71%. Sedangkan laju inflasi tahun 2018 adalah sebesar 2,80 lebih tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,67.

Angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2013 - 2018 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel : Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Kabupaten Semarang

Tahun 2013 – 2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Pertumbuhan Ekonomi | 5,62 | 5,85 | 5,52 | 5,30 | 5,69 | 5,79 |
| Laju Inflasi | 8,11 | 8,63 | 2,85 | 2,39 | 3,67 | 2,80 |

*Sumber : BPS Kabupaten Semarang Tahun 2019*

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Semarang adalah 7,62 tahun atau berada di posisi 13 besar di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang berada di posisi 11 se-Provinsi Jawa Tengah dengan besaran angka IPM yaitu 73,61. *( Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2019 ).*

**Tabel : Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Semarang**

**Tahn 2014 - 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Kabupaten Semarang | 71,65 | 71,89 | 72,40 | 73,20 | 73,61 |
| Provinsi Jawa Tengah | 68,78 | 69,49 | 69,98 | 70,52 | 71,12 |

***Sumber : BPS Kabupaten Semarang Tahun 2019***

**2.2 Kebijakan Keuangan**

**2.2.1 Pendapatan Daerah**

Hal sebagai berikut yang merupakan kebijakan khusus bidang pendapatan :

Pendapatan daerah dianggarkan secara bruto,yang berarti bahwa semua pendapatan daerah tidak boleh terlebih dulu dikurangi dengan belanja atau biaya yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut, atau juga tidak boleh dikurangi dengan bagian pihak lain dalam rangka bagi hasil;Penarikan pendapatan baik pajak maupun retribusi harus didasarkan pada peraturan perundangan dan dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah agar diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;Upaya peningkatan pendapatan melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi mutlak perlu dilakukan oleh semua komponen pengelola pendapatan daerah;Pendapatan asli daerah ditetapkan minimal naik 15% dari pendapatan pada APBD Perubahan tahun sebelumnya.

**2.2.2. Belanja Daerah**

Kebijakan yang ditempuh dalam pelaksanaan anggaranbelanja meliputi :

1. Setiap kelompok belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bisa dirinci menurut jenis, obyek, dan rincian obyek;
2. Semua rencana belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didukung dengan ketersediaan dana pada struktur pendapatan daerah;
3. Belanja yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan batas tertinggi dari pengeluaran dana. Demikian juga diharapkan bahwa angka yang dianggarkan pada sisi pendapatan merupakan angka batas terendah dari suatu penerimaan daerah;
4. Dalam pengelolaan belanja daerah perlu selalu diupayakan untuk terjadinya efisiensi dan efektivitas belanja dan upaya penghematan penggunaan dana perlu dilakukan oleh semua satuan kerja perangkat daerah;
5. Belanja daerah menampung semua pengeluaran untuk program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk belanja tidak langsung;
6. Belanja daerah juga menampung kegiatan luncuran dari kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak terselesaikan.

**2.2.3 Strategi dan Prioritas**

* + - 1. Menekan angka kemiskinan sehingga kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi;
      2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan formal maupun non formal sehingga dapat bersaing dalam memperoleh lapangan kerja;
      3. Meningkatnya daya saing daerah dan kualitas produk pertanian dan industri kecil/rumah tangga dan produk jasa pariwisata;
      4. Meningkatnya kualitas sumber daya alam dengan pengelolaan yang terkendali;
      5. Pemerataan pembangunan antar wilayah dan infrastruktur wilayah;
      6. Pemenuhan sarana dan prasaranapelayanan dasar masyarakat pedesaan terutama fasilitas pendidikan dasar, kesehatan, air bersih, transportasi, perumahan, jalan lingkungan, saluran limbah dan irigasi;
      7. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang memadai seperti jalan-jalan perkotaan, saluran air bersih, persampahan, trotoar, taman kota, arena bermain dan lain-lain;
      8. Meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat dengan peningkatan kinerja aparatur, peningkatan sumber daya aparatur, mengefektifkan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan, serta merevisi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan;
      9. Meningkatkan peran serta masyarakat desa/kelurahan dalam proses penyusunan kebijakan publik,penganggaran dan pengawasan.

**2.3 IndikatorPencapaianTargetKinerja APBD**

Pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten SEMARANG sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah ”Terwujudnya Kabupaten Semarang yang memiliki daya saing ekonomi berbasis MATRA (MANDIRI TERTIB dan SEJAHTERA), yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serata saling berinteraksi dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, mampu mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mempu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama dan Bernegara”. Selain itu juga mengacu pada visi Dinas yaitu ”Terwujudnya Kabupaten Semarang MANDIRI, TERTIB, SEJAHTERA (MATRA).”

Untuk mendukung visi tersebut di atas, Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dalam tahun anggaran 2019telah merealisasikan kinerjanya, yang mencakup 20 program dan 75kegiatan dengan ringkasan capaian indikator keluaran per bidang sebagai berikut :

(untuk indikator tingkat manfaat/outcome, tersaji dalam Form Pengukuran KinerjaKegiatan/ PPK LAKIP Dinas2019).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Program** | **CapaianTarget Kinerja (Ringkasan Keluaran)** |
| a. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1. Pelayanan surat menyurat sebanyak 8000 surat, pengadaan cetak sebanyak 11 jenis. 2. Penyediaan Jasa komunikasi selama 12 bulan, penyediaan jasa air selama 12 bulan, penyediaan jasa listrik selama 12 bulan, pengadaan alat alat listrik sebanyak 32 jenis. Pemasangan jaringan listrik , air, dan telepon/ internet di gedung kantor sejumlah 3 paket. 3. Tersedianya peralatan kerja dan perlengkapan kantor yang optimal: Sentral telepon PABX 1 unit, telepon langsung 2 unit, intercom 18 unit, mesin faximile 1 unit, jaringan wifi 1 unit, router 2 unit, sound system 3 unit, wireless 26 unit, computer 25 unit, notebook 2 unit, CCTV 25 unit, AC 4 unit, LCD 2 unit, lemari 1 unit, brankas 1 unit, meja kursi tamu 2 unit, meja kerja 3 unit, kursi kerja 3 unit, kunci meja kerja. 4. Tersedia BBM 700 Ltr, tersedia surat kabar dan majalah 4 jenis 12 bulan, tersedia tabung gas 20 kali, tersedia aqua gallon 350 galon, tersedia bahan sembako 11 bulan, tersedia makanan dan minuman harian pegawai sebanyak 150 pegawai 8 bulan, tersedia makanan dan minuman rapat selama 6 kali rapat, tersedia makanan dan minuman tamu sebanyak 8 kali, terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 35 kali. 5. Penyusunan laporan bulanan 12 kali, penyusunan laporan keuangan semesteran 2 kali, penyusunan laporan akhir tahun 1 kali, penyusunan SPP SPM dan SPJ 12 kali, penyusunan laporan PAD 12 kali, pembayaran honorarium pengelola keuangan SKPD 12 kali. 6. Tersedianya peralatan kebersihan dan pembersih sebanyak 66 jenis selama 12 bulan. 7. Terlaksananya keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (liar jawa, DKI/ Jabar, DIY, Jateng, Semarang, Salatiga) sebanyak 60 kali. 8. Outsorcing 144 orang selama 13 bulan, pegawai tidak tetap (PTT) 1 orang selama 14 bulan, tenaga bauntu penyuluh pertanian (TBPP) 67 orang selama 1 bulan, tenaga harian lepas (THL) medik dan paramedik veteriner 7 orang selama 2 bulan, honorarium pengambil samppah 2 orang 12 kali, honorarium instruktur senam 2 orang 11 kali, honorarium instruktur SKJ bersama tingkat kabupaten 4 orang 1 kali, honorarium tenaga parkir pasar hewan 10 orang selama 73 hari, honorarium lembur hari libur nasional selama 7 hari. 9. Pengelolaan aset daerah pada dinas selama 12 bulan. |
| b. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Apa-ratur | 1. Pengadaan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 26 unit, pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 224 unit, pembayaran KIR kendaraan dinas sebanyak 16 unit, pembayaran pajak dan STNK kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sebanyak 254 unit. |
| c. | Peningkatan Disiplin Aparatur | 1. Pengadaan Pakaian Dinas sebanyak 784 stel dan 1 stel PSR 2. Pengelolaan kepegawaian yang akan pension 11 orang, pengelolaan administrasi kepegawaian kenaikan gaji berkala 100 orang, pengelolaan kenaikan pangkat 14 orang. |
| d. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1. Pelaksanaan bintek 6 orang, pelaksanaan ujian barang dan jasa 3 orang. |
| e. | Peningkatan Pe-ngembangan Sis-tem Pelaporan Ca-paian Kinerja dan Keuangan | 1. Terlaksananya penyusunan dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD sebanyak 3 dokumen, Terlaksananya penyusunan laporan capaian kegiatan bulanan selama 12 bulan. |
| f. | Perencanaan | 1. Teersedianya dokumen perencanaan : dokumen RKPD sebanyak 1 dokumen, dokumen RKA & DPA penetapan sebanyak 2 dokumen, dokumen RKA & DPPA perubahan sebanyak 2 dokumen, Buku profil dinas sebanyak 70 buku, sinkronisasi kegiatan pusat dan daaeerah sebanyak 7 kali. |
| g. | Peningkatan Ketahanan Pangan | 1. Pelatihan pemanfaatan tepunngisasi sebanyak 1 kali, analisis dan penyusunan PPH sebanyak 1 kali, Monev sebanyak 6 kali. 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan (PUPM/TTI) 9 kelompok, Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perbesaran 19 kecamatan. 3. Terlaksananya monitoring harga pangan pokok/ strategis 19 kecamatan, terlaksananya sosialisasi/ rakor/ pelatihan laporan perkembangan harga pangan pokok/ strategis sebanyak 3 kali. 4. Pengisian gudang cadangan pangan pemerintah dengan gabah kering giling (GKG) sebanyak 29.700 kg, penyaluran cadangan pangan daerah sebanyak 35 kali. 5. Bantuan hibah DMP 1 paket, sosiallisasi DMP dan pembentukan tim pangan desa (TDP) sebanyak 1 kali, pelatihan desa mandiri pangan sebanyak 1 kali, pembinaan TPD dan kelompok afintas DMP sebanyak 4 kali, rakor DMP sebanyak 1 kali. 6. Sosialisasi dan pembinaan lumbung pangan masyarakat di 19 kecamatan, pelatihan pemberdayaan SDM/ kelembagaan LPM sebanyak 2 poktan. 7. Terlaksananya bantuan hibah tunda jual gabah kering giling (GKG) sebanyak 2 poktan, terlaksananya sosialisasi pengembangan model distribusi pangan yang efisien sebanyak 1 kali, terlaksananya pelatihan kelembagaan Gapoktan kegiatan tunda jual (GKG) sebanyak 1 kali. 8. Sosialisasi keamanan pangan segar sebanyak 1 kali, sosialisasi keamanan pangan siswa sekolah sebanyak 1 kali, Monev keamanan dan mutu pangan sebanyak 4 kali. 9. Rapat koordinasi dewan ketahanan pangan tingkat kabupaten sebanyak 1 kali, rapat koordinasi dewan ketahanan pangan tingkat kecamatan di 19 kecamatan, pemantauan dan pendampingan rakor DKP kecamatan sebanyak 19 kali. 10. Pelatihan SKPG sebanyak 1 kali, rapat koordinasi SKPG sebanyak 8 kali, pemantauan desa SKPG kecamatan di 19 kecamatan, penyusunan data neraca bahan makanan sebanyak 2 kali. 11. Menegikuti lomba cipta menu provinsi sebanyak 1 kali, mengikuti lomba pangan tk. Provinsi sebanyak 1 kali, mengikuti lommba makanan dan minuman TMII sebanyak 1n kali. 12. Sosialisasi dan pembinaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebanyak 2 kali, demplot kebun bibit sebanyak 3 KWT, pelatihan pekarangan sebanyak 1 kali. |
| h. | Peningkatan Kesejahteraan Petani | 1. SL-PHT tanaman padi sebanyak 60 orang, pelatihan peningkatan produktivitas ternak sebanyak 30 orang. 2. Terlaksananya pengiriman peserta PENAS KTNA 2020 sejumlah 5 orang 3. Terlaksananya pertemuan poktan, KWT dan pemuda tani sebanyak 90 orang x 2 kali, terlaksananya verifikasi poktan berprestasi sebanyak 38 poktan. |
| i. | Peningkatan Produksi Pangan | 1. Terlaksananya rapat singkronisasi data UPSUS sebanyak 4 kali, Terlaksananya sosialisasi dan pertemuan teknis penggunaan alat mesin pertanian sebanyak 1 kali, bantuan pompa air sebanyak 4 kali. 2. Terbangunynya jalan usahatani (JALUT) 25 unit, terlaksananya pengembangan tanaman bakau (DBHCHT) di 7 lokasi/ kelompok tani, terlaksananya diversifikasi tembakai-kopi 2 Ha, tersedianya alat olah lahan-Cultivator (DBHCHT) 10 unit, tersedianya handsprayer elektrik 10 unit, tersedianya sarana angkut kendaraan tiga roda (DBHCHT) 100 unit, tersedianya alat pasca panen (para-para dan terpal) 20 paket, terlaksananya kajian teknis tembakau 45 orang. 3. Benih padi 120 kg, bibit pisang planlet 73 botol, bibit jagung manis 50 sachet, bibit alpukat seedling 1200 batang, pupuk 1 paket, bahan obat obatan 1 paket, bahan kimia 1 paket. 4. Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya, terlaksananya peremajaan tanaman cengkeh sebanyak 4.000 batang, terlaksananya intensifikasi tanaman cengkeh sebanyak 2 kelompok tani, terlaksananya pengadaan alat pasca panen kopi sebanyak 2 paket. 5. Peremajaan tanaman cengkeh 5000 btg, peremajaan tanaman kopi 2000 btg, pupuk organic 21000 kg, peningkatan mutu hasil kopi 4 paket. 6. Pembangunan JALUT 34 unit, pembangunan JILUT 29 unit, pembangunan irigasi air tanah dalam 1 unit, pembangunan irigasi air tanah dangkal 5 unit. 7. Bantuan intensifkasi hortikultura : bantuan bibit tanaman buah alpukat 10000batang, bantuan bibit tanaman buah durian 10000 batang, pupuk organic 20000 kg. Bantuan kawasan florikultura (demplot mawar) : bibit mawar 8000 batang, plastic UV 4 roll, screen net 8 roll, pupuk organik 5000 kg. Bantuan kawasan organic : mulsa plastik hitam perak 24 roll, pertemuan sosialisasi 90 orang, pertemuan koordinasi/ pembinaan 40 orang, penyuluhan/ pembinaan budidaya komoditas buah 400 orang, blimbing teknis hortikultura 1 kali. 8. Terlaksananya pembuatan rumah burung hantu (RUBUHA) 34 unit, terlaksananya upaya penanggulangan OTP 163 Ha, terlaksananya rapat koordinasi pengendalian OTP 12 kali. |
| j. | Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | 1. Pemenuhan operasional UPTD STA jetis 12 bulan, pemeliharaan fasilitas UPTD 1 paket. 2. Terlaksananya promosi produk unggulan daerah (local, regional dan nasional) 4 kali |
| k. | Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. | 1. Pendampingan kegiatan pembangunan Dam Parit (DAK) dan pembangunan embung (DAK) 1 paket. |
| l. | Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. | 1. Pengaadaan rodentisida 233 kg/ltr, pengadaan insektisida 210 kg/ltr, pengadaan fungisida 90 kg/ltr, pengadaaan PH meter tanah 3 unit   2) Pembangunan jalan usaha tani (JALUT) 32 unit, SLPHT tanaman kopi 50 orang, SLPHT tanaman cengkeh 50 orang, kemitraan/ temu usaha kopi 60 orang, kemitraan/ temu usaha tembakau 60 orang, surveyland kopi organik 3 kelompok, kkajian teknis kopi 45 orang. |
| m. | Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan. | 1. Teersusunya buku programa penyuluhan pertanian 20 dokumen. 2. Terlaksananya rehab BPP kecamatan Tengaran 1 unit, kecamatan Ungaran Timur 1 unit, Kecamatan Ambarawa 1 unit, Terlaksananya pengadaan sepeda motor bebek 3 unit, terlaksananya pengadaan PH meter tanah 3 unit, terlaksananya pengadaan LCD dan proyektor 3 unit, terlaksananya pengadaan almari kantor 2 pintu 3 unit, terlaksananya pengadaaan almari kaca/ etalase 3 unit, terlaksananya pengadaan wireless portable 3 unit, terlaksananya pengadaan meja rapat 3 unit, terlaksananya pengadaan kursi rapat 90 unit, terlaksananya pengadaaan drone (1 set) 3set/ paket, terlaksananya pengadaan PC all in one 3 unit, terlaksananya pengadaan UPS 3 unit. 3. Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh 74 orang, terlaksananya workshop penyuluh 140 orang. |
| n. | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | 1. Pendataan penyakit ternak dan ikan sebanyak 12 jenis penyakit dan teramatinya penyakit ternak dan ikan sebanyak 250 pengamatan, pelayanan pelaku usaha peternakan sebanyak 2 jenis pelaku usaha, kegiatan bulan bakti keswan dan kesmavet 1 kali. 2. Pelaksanaan vaksinasi ternak 1800 ekor, pelaksanaan vaksinasi unggas 40000 ekor, pemeriksaan kesehatan dan reproduksi ternak 1400 ekor, pelaksanaan pengobatan ikan 2 kali, pelaksanaan monitoring kegiatan 19 kali, koordinasi dan konsultasi kesehatan hewan 1 kali, pertemuan kesehatan hewan/ puskeswan 1 kali, pelaksanaan bulan bakti kesehatan hewan 1 kali. 3. Terlaksananya pengamanan terhadap ternak dari serangan oenyakit endemis di 19 kecamatan, terlaksananya pembinaan peternakan unggas biosecurity 4 kali, terlaksananya pembinaan penyakit hewan menular endemis ke masyarakat di 19 kecamatan, terlaksananya pemusnahan limbah medis sebanyak 4 kali. 4. Terlaksananya pengawasan lalu lintas perdagangan ternak selama 12 bulan, terlaksananya pemeriksaan kesehatan hewan selama 12 bulan. 5. Pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan sebanyak 1 paket, pelaksanaan pengawasan obat hewan sebanyak 5 kali. 6. Pemerisaan sampel pullorum sebanyak 500 sampel, pemeriksaan sampel brucella sebanyak 200 sampel, pemerisaan sampel AI/ND sebanyaj 500 sampel, pemeriksaan sampel susu sebanyak 625 sampel, pemeriksaan sampel daging sebanyak 325 sampel, koordinasi bidang laboratorium sebanyak 1 kali. |
| o. | Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 1. Pertemuan inseminator dan koordiinasi oembibitan sebanyak 4 kali, monitoring pembibitan (PKB, uji petik semen beku, kelompok pembibitan dan UPSUS SIWAB) selama 12 bulan, terlaksananya sosialisasi IB kambing di 2 desa, pelatihan dan pembinaanpetugas inseminator (IB/PKb/ATR) sebanyak 4 petugas. 2. Pengawasan peredaran pakan sebanyak 10 sampel, pembinaan pakan terhadap produsen, konsumen, dan distributor pakkan ternak sebanyak 40 orang, pertemuan koordinasi/ budidaya/ koordinasi pakan/ laboratorium pakan/ workshop wastukan sebanyak 4 kali, pengadaan sarana dan prasarana laboratorium pakan sebanyak 1 unit. 3. Bimbingan teknis budidaya ternak dan pengelolaan kotoran ternak sebanyak 50 orang, pembinaan pelaku usaha peternakan sebanyak 45 orang, pertemuan/ rapat koordinasi / konsultasi pengembangan agribisnis peternakan sebanyak 1 kali. 4. Sosialisasi aturan ernak pemerintah sebanyak 2 kali, pelaksanaan monitoring ternak pemerintah sebanyak 1763 ekor. |
| p. | Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | 1. Penataan pasar hewan ambarawa sebanyak 1 paket. 2. Operasionalisasi pasar hewan ambarawa sebanyak 1 unit, operasionalisasi pasar hewan di wilayah kecamatan sebanyak 6 unit. 3. Terlaksananya promosi produk peternakan unggulan daerah sebanyak 2 kali, terlaksananya gerakan minum susu anak sekolah masyarakat dan karyawan ( Gerimiss semarak) sebanyak 3500 orang, terlaksananya pembinaan pengolahan hasil ternak sebanyak 1 kali. 4. Pembinaan kelompok/ peternak yang mengakses kredit sebanyak 1 kali, pembinaan usaha Agribisnis peternakan sebanyak 1 kali, operasional asuransi ternak selama 1 tahun. |
| q. | Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1. Pengambilan sampel sebanyak 1950 sampel, monitoring higiene santasi dan komitmen halal di tempat pemootongan di 5 lokasi RPH-R/U, Pemantauan dan pengawasan peredaran produk hewan di pasar tradisional sebanyak 50 kali, pengujian laboratorium untuk uji cemaran qurban sebanyak 120 sampel, pemeriksaan Antemortem dan Postmortem hewan qurban di 19 kecamatan, sertifikat halal MUI sebanyak 2 sertifikat, pembangunan IPAL RPH-R/U sebanyak 1 paket. 2. Sosialisasi pemotongan qurban dan pengamanan limbah pasca pemotongan qurban sebanyak 360 orang 3. Terlaksananya pemotongan ternak ASUH di RPH-R/U di 6 lokasi. |
| r. | Pengembangan Budidaya Perikanan | 1. Tersedianya pakeet pembenihan lele sebanyak 1 paket. 2. Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan penataan keramba di rawa pening sebanyak 2 kelompok selama 1 kali, terlaksananya demplot budidaya ikan nila sebanyak 2 paket, terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana paket budidaya lele sebanyak 10 paket. 3. Terlaksananya magang pembudidaya llele sebanyak 8 orang, terlaksananya magang pembudidaya ikan hias sebanyak 4 oraang, terlaksananya paket bantuan percontohan budidaya ikan gabus sebanyak 1 paket. 4. Penyediaan bahan non medis sebanyak 1 paket, pengadaan pakan ternak ikan sebanyak 1 paket, pengadaan bahan obat obatan ikan sebanyak 1 paket. 5. Terlaksananya rehabilitaasi bangunan panti benih/ bangsal/ hacchery sebanyak 1 paket, terlaksananya rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) sebanyak 1 paket, terlaksananya rehabilitasi kolam atau bak larva sebanyak 1 paket. |
| s. | Pengembangan Perikanan Tangkap | 1. Terlaksananya pembinaan kelompok nelayan sebanyak 25 kelompok(625 orang), terlaksananya gerakan temu nelayan sebanyak 1 kali, terlaksananya gerakan bersih rawa pening sebanyak 2 kali. 2. Terlaksananya pemeliharaan tempat pelelangan ikan sebanyak 1 kali. 3. Pengadaan prasarana berupa : jalan alur perahu/ klante sebanyak 4 paket/ unit. 4. Pengawasan penangkapan ikan oleh ppokmaswas sebanyak 12 kali, sosialisasi pelestarian sumber daya ikan PUD/ Rawa Pening sebanyak 4 kali, terlaksananya penebaran benih ikan nila untuk PUD sebanyak 600.000 ekor. |
| o. | Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | 1. Terlaksananya pembinaan Poklahsar hasil perikanan sebanyak 25 kali, terlaksananya sosialisasi forikan sebanyak 3 kali, mengikuti event lomba masak ikan tingkat provinsi sebanyak 1 kali. 2. Sosialisasi penyusunan kualtas dan teknik kemasan hasil produksi perikanan sebanyak 120 orang.. 3. Promosi produk hasil perikanan 10 poklahsar, pelaksanaan gemarikan sebanyak 1 kali. 4. Operasionalisasi pasar ikan higienis di 1 lokasi selama 12 bulan. |

**BAB III**

**IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Secara keseluruhan untuk target pendapatan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 3.235,521.100,- (mencapai 86,74%) bila dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp.3.729.927.000,-

Tabel Perkembangan Pendapatan Daerah berdasarkan Sumbernya

Tahun 2019 – 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sumber Pendapatan** | **2020** | | **2019** | |
| **( Rp. )** | **( % )** | **( Rp. )** | **( % )** |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 3.235,521.100 | 86,74 | 2.875.010.150 | 81,78 |
|  | **Total PAD** | 3.235,521.100 | 86,74 | 2.875.010.150 | 81,78 |

Tabel Perkembangan Belanja Daerah

Tahun 2019–2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **BELANJA** | **2020** | | **2019** | |
| **( Rp. )** | **( Rp. )** | **( Rp. )** | **%** |
| **1** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | 15.916.123.251 | 81,01 | 17.957.023.413 | 94,84 |
|  | Belanja Pegawai | 15.916.123.251 | 81,01 | 17.957.023.413 | 94,84 |
|  | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **BELANJA LANGSUNG** | 34.602.389.357 | 94,45 | 44.844.835.472 | 96,75 |
|  | Belanja Pegawai | 0 | 0 | 113.769.000 | 88,30 |
|  | Belanja Barang dan Jasa | 33.493.125.678 | 94,19 | 42.552.049.047 | 96,79 |
|  | Belanja Modal | 1.014.030.279 | 48,68 | 2.179.017.425 | 95,99 |
|  | **Jumlah** | 50.423.279.208 | 88,01 | 62.801.858.885 | 0 |

Untuk belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai selama tahun 2020 belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 15.916.123.251,00 (mencapai 81,01%) bila dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp**.**19.648.016.000,00. Belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung apabila dibandingkan dengan tahun yang lalu mengalami penurunan. Belanja langsung tahun ini mencapai 94,45%, sedangkan belanja tidak langsung terealisasi 81,01%.

Bila dikaitkan dengan program, kegiatan sesuai bidang kewenangan, dari anggaran yang tersedia untuk belanja langsung tahun 2020 sebesar Rp.57.291.063.000,00 terealisasi sebesarRp.50.423.279.208,00 (88,01%) yang teralokasi pada 3 urusan yaitu urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan urusan Kelautan dan Perikanan yang mencakup 20 program dan 76 kegiatan sesuai DPA dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun 2020.

Jumlah total rekapitulasi setor kembali/CP *(Contra Post)* Pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 130.732.156,00, yaitu terdiri dari ;

1. Pengembalian LS gaji atas tambahan penghasilan berdasar prestasi kerja a.n Ari Murti karena yang bersangkutan mengajukan pensiun dini sebesar Rp. 1.222.650,-
2. Pengembalian UP Dinas Pertanian, Perikanan, dan pangan Kabupaten Semarang sebesar Rp. 129.509.506,-

**BAB IV**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Bupati Nomor Tahun 2012tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang, Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Semarang, Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Semarang

Untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran didasarkan pada realisasi dana APBD yang telah dipertanggungjawabkan dan telah dilakukan verifikasi.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu untuk disajikan meliputi:

1. **Akuntansi Pendapatan**

Pendapatan diakui pada saat diterima direkening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

1. **Akuntansi Belanja dan Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa .dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja merupakan semua pengeluaran Kas umum Daerah (KUD) yang mengurangi ekuitas dana lancer dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat timbulnya Kewajiban, Terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurnan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Suatu Pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (akan menjadi aset)jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

* + Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  + Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
  + Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

1. **Persediaan**

Persediaan adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

1. Barang perlengkapan (suplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
2. Bahan atau perlengkapan (suplies) yang digunakan dalam rangka proses produksi.
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan pipa, persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, akan tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), pengukuran persediaan disajikan sebesar :

1. Biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya, seperti donasi / rampasan;

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnyaq yang serupa mengurangi biaya perolehan.

1. **Kewajiban**

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima danatau pada saat kewajiban timbul.Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Utang kepada Pihak Ketiga saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

1. **Koreksi Kesalahan**
2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
3. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (dengan PERDA), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait.
4. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.
5. **Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran**

Aset tetap (tidak termasuk yang berasal dari donasi, sumbangan, dan hibah) diakui dan / atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.

Verifikasi antara lain, meliputi reklasifikasi belanja modal yang tidak sesuai peruntukan rekeningnya, misalnya belanja modal jaringan listrik / telpon (tambah daya listrik kantor) dikapitalisasi ke nilai bangunan karena nilainya melekat di bangunan, kecuali jaringan untuk infrastruktur diluar bangunan. Aset tetap yang berasal dari donasi, sumbangan, dan hibah diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat Aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Dalam pengakuan Aset telah dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama.

Pengurangan adalah penurunan nilai Aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan Aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan Aset tetap yang bersangkutan. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nilai aset tetap bisa disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Aset tetap karena meningkatnya manfaat Aset tetap. Pengembangan Aset tetap diharapkan akan(1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi, dan/ atau (3) menurunkan biaya pengoperasian sebuah Aset tetap. Termasuk dalam pengembangan Aset tetap adalah rehabilitasi dan pemeliharaan Aset tetap.

Biaya pengembangan yang memenuhi syarat akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset tetap. Pengembangan Aset tetap berasal dari pos belanja operasional pemeliharaan dan Belanja Modal.

Penggantian utama adalah memperbaharui bagian utama Aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari Aset tetap semula dan menambah biaya penggantian pada harga perolehan Aset tetap.

Pengukuran Aset Tetap

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tanah yang disajikan dalam neraca berdasarkan tanah yang dimiliki dan atau dikuasai dan dilaporkan oleh masing-masing Unit Kerja baik berasal dari perolehan hak, ataupun yang berasal dari instansi vertikal. Pemisahan klasifikasi tanah berdasarkan legalitas status kepemilikan tidak disajikan mengingat validitas data belum teruji dan belum dilakukan pemutakhiran data untuk keseluruhan.

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan aset yang ada yang dilaporkan oleh unit kerja pada konsultan apraisal, dan dinilai berdasarkan harga pasar saat dinilai. Sesudahnya setiap terjadi penambahan dinilai dengan harga perolehan. Harga perolehan meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan jaringan listrik, air bersih, dan sambungan telepon yang melekat pada gedung (in door) dicatat sebagai satu kesatuan dengan gedung.

Biaya perolehan listrik, air bersih, dan telepon yang bersifat tambahan fasilitas (out door) dicatat terpisah dari gedung dan dicatat sebagai jaringan. Termasuk dalam kategori ini misalkan: jaringan listrik untuk lampu taman dan air mancur, telepon, jaringan air untuk fasilitas pemadam kebakaran.

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Jembatan, Bangunan Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

* + 1. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin – mesin dan kendaraan bermotor , alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.

* + 1. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas , yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.Aset tetap lainnya merupakan aset buku, monumen rambu, gapura dan tugu batas disajikan berdasarkan nilai wajar aset / barang yang ada saat dilakukan inventarisasi. Sedangkan penambahan sesudahnya berdasarkan harga perolehan. Khusus buku termasuk yang nilai perolehannya dibawah Rp.300.000,00.

* + 1. Aset Lain-lain

Aset Tak Berwujud (software/ program aplikasi ) yang disajikan merupakan tambahan mutasi berdasarkan realisasi anggaran belanja modal sejak tahun 2003 yang dapat diinventarisasi dan dinilai dengan menggunakan harga perolehan. Aset Lain-lain juga untuk rekening piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang sulit dipastikan realisasi pembayarannya.

1. **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai dari pembelian/pengadaan barang/jasa (secara kredit) yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai kepada proses penyelesaian/pembayaran utang yang bersangkutan. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang mempunyai kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang dibayarkan dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, yang terdiri dari:

1. Pendapatan diterima dimuka: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan mempunyai kewajiban pendapatan diterima dimuka yang didapat dari retribusi Sewa Lahan (RPH Ambarawa), Retribusi Sewa Tanah da Bangunan (Kolam BBI SIwarak dan PIH), dan retribusi Sewa Kios.
2. Utang Belanja Pegawai: merupakan utang jangka pendek yang berupa insentif atau upah pungut yang belum terealisasi di tahun 2020 dari perhitungan seluruh retribusi yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang.
3. **Ekuitas**

**Ekuitas** adalah besarnya hak residual atau kepentingan pemilik entitas terhadap aset entitas tersebut setelah dikurangi semua kewajiban dalam neraca. Arti ekuitas dapat juga didefinisikan sebagai modal atau kekayaan suatu entitas, yaitu selisih jumlah aktiva (aset) dikurangi dengan pasiva (kewajiban).

**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada OPD Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, secara garis besar jumlah anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun 2020 | | | Tahun 2019 |
| Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Pendapatan | 3.729.927.000,00 | 3.235.521.100,00 | 86,74 | 5.853.733.849,00 |
| 2 | Belanja | 57.291.063.000,00 | 50.423.279.208,00 | 88,01 | 66.753.107.548,00 |
| 3 | Surplus (Defisit) | (53.561.136.000,00) | (47.187.758.108,00) | 88,10 |  |

Dari data di atas menunjukkan bahwa terdapat realisasi anggaran pada tahun 2020 pendapatan sebesar Rp. 3.235.521.100,00,-. Dan Belanja sebesar Rp. 50.423.279.208,00 Sedangkan penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 dan perbandingannya dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**5.1.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN**

Pendapatan Daerah pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Yang Syah, dengan anggaran dan realisasinya dalam tahun anggaran2019 adalah sebagai berikut :

* 1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun 2020 | | Tahun 2019 |
| Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Retribusi Daerah | 3.385.327.000,00 | 2.889.567.100,00 | 2.525.621.150,00 |
| 2. | Lain lain PAD yang Sah | 344.600.000,00 | 345.954.000,00 | 349.389.000,00 |
|  | **Jumlah** | **3.729.927.000,00** | **3.235.521.100,00** | **2.875.010.150,00** |

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 3.729.927.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3.235.521.100,00atau sebesar 86,74%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp. 2.875.010.150,00maka realisasi tahun ini naik sebesar Rp. 360.510.950,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

* + 1. ***Retribusi Daerah***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun 2020 | | Tahun 2019 |
| Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1. | Retribusi Pelayanan Pasar :   * Retribusi Pelayanan Sampah Pasar * Retribusi Pelayanan Pasar Jetis * Retribusi Pelayanan Pasar Hewan * Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Puskeswan | 1.746.331.000  996.132.000  750.199.000  0,00 | 1.480.525.800  992.669.000  487.856.800  0,00 | 12.000  834.088.000  444.490.600  31.125.000- |
| 2. | Retribusi Jasa Usaha   * Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :  1. Retribusi   Sewa Tanah   1. Retribusi Sewa Lab 2. RetribusiTimbangan Ternak 3. RetribusiPemeriksaan Kesehatan Hewan  * Retribusi Tempat Khusus Parkir * Retribusi Rumah Potong Hewan * Retribusi Penjualan Prod Usaha Daerah | 62.206.000,-  0,-  0,-  289.602.000,-  823.997.000,-  244.416.000,-  218.775.000,- | 33.020.000,-  0,-  0,-  250.016.800,-  673.882.000,-  258.750.400,-  193.372.100,- | 56.817.000  35.147.000  10.570.500  245.340.850  569.578.000  144.533.700  153.918.500 |
|  |  | 3.385.327.000,- | 2.889.567.100,- | 2.525.621.150,- |

Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 3.385.327.000,- dan terealisasi sebesar Rp.22.889.567.100,- atau 85,36 %. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 2.525.621.150,- maka realisasinya naik sebesar Rp. 363.943.950,-.

Pada retribusi pelayanan pasar hewan target sejumlah Rp. 750.199.000 terealisasi sebesar Rp. 487.856.800,-. Alasan tidak mencapai target adalah

1. Adanya pandemic Covid-19 menyebabkan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang harus menutup pasar 4kali pada Bulan April 2020, sehingga Selama 4 pasaran tidak ada pedapatan.
2. Jumlah ternak yang masuk ke pasar hewan mengalami penurunan, khususnya di pasar Hewan Ambarawa Sapi yang masuk hanya sekitar 500 ekor dan kambing/domba 600 ekor tiap pasaran pon.
3. Jumlah pedagang PKL dan oprokan berkurang. Pedagang PKL 275 dan pedagang oprokan 280
4. Jumlah kios kayu yang buka rata rata hanya 27 kios dari total 37 kios kayu yang ada.

Pada Retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan di Puskeswan dari target sebesar Rp. 254.802.000,- terealisasi sebesar Rp. 215.784.800,- tidak mencapai target dikarenakan berkurangnya ternak yang masuk di pasar hewan dan rendahnya jumlah ternak yang minta ntuk dilayani kesehatannya.

Pada retribusi penyewaan tanah dari target Rp. 62.206.000,- hanya terealiasi Rp. 33.020.000 dikarenakan adanya wabah Covid-19 menyebabkan kegiatan gantangan burung tidak dipebolehkan dilaksanakan karena menimbulkan kerumanan sehingga tidak diberikan ijin oleh aparat setempat sejak awal adanya pandemic hingga saat ini.

Untuk retribusi sewa laboratorium (Lab Pemeriksaan air Susu) realisasi mencapai 98,37% dari target dikarenakan turunnya produksi susu di KUD Mekar Ungaran akibat Berkurangannya jumlah susu yang disetorkan ke KUD.

Pada Retribusi Tempat Parkir Khusus dari Target Sebesar Rp. 823.997.000 terealisasi Rp. 673.882.000 alesan tidak tercapai target dikarenakan:

1. Adanya tempat parkir/lokasi parker di sekitar pasar hewan yang dikelola oleh perorangan/masyarakat setempat menyebabkan berkurangnya pengunjung yang parker di dalam area pasar hewan.
2. Kendaraan yang diparkir di lokasi parkir yang dikelola pasar hewan (10 titik) sebagian besar adalah pedagang pasar hewan sehingga mereka memarkirkan kendaraannya sampai pasar selesai dan hanya membayar 1 kali parkir, berbeda dengan parkir yang ada di pinggir pasar hewan yang rata rata adalah konsumen, sehingga keluar masuknya kendaraan yang parker cukup banyak.
3. Sarana parkir di pasar hewan yang kurang representative dibandingkan dengan parkir yang ada di luar, sehingga para konsumen lebih banyak memillih tempat parkir yang sarannya memadai dan tidak becek pada saat musimm hujan.
4. Adanya pembangunan talut pasar hewan selama 2 bulan mengakibatkan berkurangnya lahan parkir pada 2 titik parkir.

Untuk retribusi penjualan produksi usaha daerah target sebesar Rp. 218.775.000 terealisasi Rp. 193.372.100,-. Adapun asalan tidak mencapai target adalah :

1. Produk benih dan bibit ikan belum laku terjual semua
2. Menurunnya daya beli benih akibat dampak Covid-19
3. Menurunnya produksi padi akibat serangan hama
4. Menurunnya produksi jagung karena kekurangan air pada fase vegetatitf sehingga produksi tidak optimal

Untuk fasilitas umum realisasi sebesar 96,64% dari target. Adapun alas an tidak tercapai target dikarenakan akibat pasar hewan tutup selama 4 pasaran mengakibatkan tidak adanya penerimaan dari pendapatan MCK. Dan setelah pasar hewan buka kondisi pasar belum ramai karena masih belum banyak pedagang dan pengunjung.

* 1. ***Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun 2020 | | Tahun 2019 |
| Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1. | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan :   * Penjualan Hasil Pertanian * Penjualan Hasil Peternakan | 0,- | 0,- | 57.566.000  - |
| 2. | Fasilitasi Sosial dan Fasilitas Umum   * Fasilitas Umum | 38.600.000,- | 37.304.000,- | 33.673.000 |
| 3. | Pendapatan Lain-lain :   * Laba Revolving Dinas Peternakan * Penerimaan Lainnya | 306.000.000,- | 308.650.000,- | 258.150.000  - |
|  |  | 344.600.000,- | 345.954.000,- | 349.389.000 |

Lain-lain PAD Yang Syah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 344.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 345.954.000,- atau sebesar 100,39%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 349.389.000,- maka mengalami Kenaikan sebesar Rp. 3.435.000,-.

**5.1.2 PENJELASAN POS-POS BELANJA**

Anggaran Belanja Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang pada Tahun 2020 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan anggaran dan realisasinya pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun 2020 | | Tahun 2019 |
| Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1. | Belanja Operasional  - Belanja Pegawai  - Belanja Barang dan Jasa  - Belanja Hibah | **55.208.195.000,-**  19.648.016.000,-  35.560.179.000,-  0,- | **49.409.248.929,-**  15.916.123.251,-  33.493.125.678,-  0,- | **60.622.841.460,-**  18.070.792.413,-  9.788.429.678,-  32.763.619.369,- |
| 2. | Belanja Modal   * Peralatan dan Mesin * Gedung dan Bangunan * Jalan, Irigasi dan Jaringan * Aset Tetap Lainnya | **2.082.868.000**,-  160.975.000,-  301.718.000,-  1.620.175.000,-  0,- | **1.014.030.279,**-  156.184.750,-  253.331.600,- 604.513.929,-  0,- | **2.179.017.425,**-  1.208.257.425,-  278.721.000,- 673.339.000,-  18.700.000,- |
|  | Jumlah | **57.291.063.000**,- | **50.423.279.208**,- | **62.801.858.885**,- |

Anggaran Belanja Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 57.291.063.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.423.279.208,-atau sebesar 88,01%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 62.801.858.885,- maka mengalami penurunan.

1. **Belanja Operasi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun 2020 | | Tahun 2019 |
| Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
|  |  |  |  |  |
| 1  2  3 | Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Hibah | 19.648.016.000,-  35.560.179.000,-  0,- | 15.916.123.251,-  33.493.125.678,-  0,- | 18.070.792.413,-  9.788.429.678,-  32.763.619.369,- |
|  | Jumlah | **55.208.195.000,-** | **49.409.248.929,-** | **60.622.841.460,-** |

Belanja Operasi Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang pada Tahun 2020 Rp. 49.409.248.929,- atau 89,50%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 60.622.841.460,- maka mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena:

* 1. Adanya efisiensi belanja
  2. Adanya sisa tender
  3. Adanya penyesuaian harga
  4. Adanya penyesuaian kegiatan

.

***Belanja Pegawai***

Belanja Pegawai untuk Tahun 2020 digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun 2020 | | Tahun 2019 |
| Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | Belanja Gaji dan Tunjangan  Belanja Tambahan Penghasilan PNS  Insentif Pemungutan Retribusi Daerah\*\*  Honorarium PNS  Honorarium Non PNS  Uang Lembur  Uang Saku Piket Libur Nasional | 15.507.764.000,-  4.025.267.000,-  15.203.000,-  33.200.000,-  31.220.000,-  29.362.000,-  6.000.000,- | 11.945.162.281,-  3.871.588.134,-  4.139.436,-  33.200.000,-  26.113.400,-  26.899.000,-  4.700.000,- | 13.024.154.475,-  4.901.112.500,-  31.756.438,-  39.700.000,-  47.170.000,-  26.899.000,-  0,- |
|  | **Jumlah** | 19.648.016.000**,-** | 15.916.123.251**,-** | 18.070.792.413**,-** |

Belanja Pegawai pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 19.648.016.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.916.123.251,- atau sebesar 81,01% mengalami penurunan sebesar Rp. 2.154.669.162,-. Perbedaan antara target dan realisasi dikarenaan adanya pegawai yang pensiun. Terdapat anggaran gaji PPPK tetapi belum bisa dicaikan karena SK belum turun dan Anggaran tunjangan kinerja yang semula sudah dianggarkan naik tetapi tidak jadi naik sehingga terjadi sisa anggaran. Insentif pemungutan retribusi tidak tercapai karena target PAD tidak tercapai.

1. ***Belanja Barang dan Jasa***

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2020 digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun 2020 | | Tahun 2019 | |
| Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22. | Biaya Bahan Pakai Habis Kantor  Biaya Bahan Material  Biaya Jasa Kantor  Belanja Premi Asuransi  Biaya Perawatan/Pemeliharaan  Biaya Cetak dan Penggandaan  Biaya Sewa Rumah/ Gedung  Biaya Sewa Sarana Mobilitas  Biaya Sewa Peralatan dan Perle-ngkapan Kantor  Biaya Makanan Dan Minuman  Biaya Pakaian Dinas  Biaya Pakaian Kerja  Biaya Pakaian Khusus dan Hari tertentu  Biaya Perjalanan Dinas  Biaya Kursus Pelatihan  Biaya Pemeliharaan  Biaya Jasa Konsultan  Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga  Belanja Kursus Pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS  Belanja Honorarium Non Pegawai  Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat  Belanja Hibah Barang Untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 624.892.000,-  1.180.446.000,- 4.782.733.000,-  134.924.000,- 247.531.000,-  192.700.500,- 0,-  54.018.000,- 420.000,-  656.723.000,-  98.000.000,-  38.336.000,-  3.900.000,-  1.115.868.500,-  0,-  406.815.000,-  0,-  25.716.407.000,-  11.000.000,-  132.815.000,-  26.000.000,-  0,- | 577.973.872,-  1.145.862.950,- 4.509.167.657,-  127.055.784,- 213.232.596,-  162.065.900,-  0,-  49.908.000,-  420.000,-  628.725.800,-  96.090.000,-  36.986.000,-  3.900.000,-  872.805.525,-  0,-  383.193.000,-  0,-  24.407.799.594,-  10.824.000,-  128.115.000,-  8.000.000,-  0,- | 623.650.464,-  1.301.200.077,- 4.162.672.227,-  96.699.287,-201.382.975,- 219.482.100,-  172.849.089,- 56.700.000,-  19.470.000,-  845.621.800,-  160.033.000,-  38.910.000,-  11.490.000,-  1.450.954.489,-  13.800.000,-  129.717.000,-  104.697.170,-  32.763.619.369,-  13.800.000,-  142.950.000,-  36.150.000,-  0,- | |
|  | Jumlah | 35.560.179.000,- | 33.493.125.678,- | 42.552.049.047,- | |
| Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 35.560.179.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 33.493.125.678,- atau sebesar 94,19% .   * Terdapat Efisiensi pada rekening belanja bahan habis pakai seperti alat kantor dan perlengkapan elektronik, belanja perangko dan materai, BBM. * Terdapat sisa pengehematan pada belanja bahan/bibit, bahan obat obatan dan bahan kimia. * Sisa tender pakan ternak dan efisiensi pada belanja makan minum, perjalanan dinas, lembur, dan penggandaan.  1. **Belanja Modal**   Belanja Modal pada tahun 2020 digambarkan sebagai berikut :   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2020 | | Tahun 2019 | | Anggaran | Realisasi |  | | 1. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 160.975.000,- | 156.184.750,- | 1.208.257.425,- | |  | * Belanja Modal pengadaan alat angkutan darat bermotor | 0,- | 0,- | 142.031.000,- | |  | * Belanja Modal pengadaan alat angkutan darat tak bermotor | 0,- | 0,- | 9.000.000,- | |  | * Belanja Modal Pengadaan alat ukur | 43.000.000,- | 42.295.000,- | 0,- | |  | * Belanja Modal pengadaan alat pengolahan | 18.218.000,- | 18.218.000,- | 161.940.125,- | |  | * Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 154.789.300,- | |  | * Belanja modal pengadaan alat rumah tangga | 19.311.000,- | 19.261.750,- | 87.737.000,- | |  | * Belanja Modal pengadaan komputer | 24.236.000,- | 24.000.000,- | 609.260.000,- | |  | * Belanja Modal Pengadaan alat studio | 0,- | 0,- | 22.500.000,- | |  | * Belanja Modal Pengadaan alat kedokteran | 18.000.000,- | 14.300.000,- | 0,- | |  | * Belanja Modal pengadaan unit unit laboratorium | 26.210.000,- | 26.110.000,- | 21.000.000,- | | 2. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 301.718.000 | 253.331.600,- | 278.721.000,- | |  | * Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja | 301.718.000,- | 253.331.600,- | 278.721.000,- | | 3. | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 1.620.175.000,- | 604.513.929,- | 673.339.000 | |  | * Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 891.875.000,- | 391.306.529,- | 673.339.000,- | |  | * Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air kotor | 716.900.000,- | 201.807.400,- | 0,- | |  | * Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telp | 11.400.000,- | 11.400.000,- | 0,- | | 4. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,- | 0,- | 18.700.000,- | |  | * Belanja Modal Pengadaan Hewan | 0,- | 0,- | 18.700.000,- | |  | Total | 2.082.868.000,- | 1.014.030.279,- | 2.179.017.425,- |   Belanja Modal pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 2.082.868.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.014.030.279,- atau sebesar 48,68%. Alasan anggaran belanja modal tidak terserap maksimal adalah:   1. Pada Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman terdapat sisa anggaran 421.581.406 yang berasal dari sisa anggaran penghematan belanja hibah konstruksi bangunan 2. Pada kegiatan peningkatan produksi, produkifitas, dan mutu produk perkebunan prodk pertanian terdapat sisa anggaran Rp. 113.934.303 yang berasal dari sisa anggaran pengehematan belanja hibah kontruksi bangunan 3. Terdapat sisa anggaran Rp. 242.811.400 pada kegiatan Pengembangan Intensifikasi tanaman Hortikultura yang berasal dari penghematan anggaran hibah bibit durian dan alpukat 4. Pada kegiatan Pengamanan Produk Hewan dan Ikutannya terdapat sisa anggaran Rp. 527.313.700 merupakan anggaran Bankeu yang akan dilaksanakan di TA.2021 5. Pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani pembudidaya ikan Rp. 621.488.500 merupakan proses gagal lelang dikarenakan tidak ada penawar yang memenuhi evaluasi 6. Pada Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perikanan budidaya Rp. 517.154.471 merupakan pembangunan panti benih proses lelang gagal (dikarenakan tidak ada penawar yang memenuhi evaluasi) 7. Selebihnya merupakan sisa anggaran yang berasal dari pengematan belanja.   **5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA**  Neraca Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2019. Adapun uraian secara lengkap seperti tersaji pada penjelasan sebagai berikut :  **5.2.1 ASET** | | | | | | | | |
| Total aset Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 72.538.407.979,23,- mengalami Penurunan dibandingakan dengan posisi 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.73.944.438.388,29 Jumlah tersebut terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dengan gambaran sebagai berikut :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2019 | | Realisasi ( Rp ) | Realisasi ( Rp ) | | 1.  2.  3. | Aset Lancar  Aset Tetap  Aset Lainnya | 220.821.725,84,-  55.316.807.186,72,-  17.000.779.066,67,- | 344.499.049,14,-  56.034.535.272,48,-  17.565.404.066,67,- | |  | Jumlah | 72.538.407.979,23,- | 73.944.438.388,29,- | | | | | | | |
| * 1. **Aset Lancar**   Aset lancar Per 31 Desember 2020 digambarkan sebagai berikut :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2019 | | 1.  2.  3. | Kas dan setara kas  Beban Dibayar Dimuka  Persediaan | 5.675.000,-  5.282.655,84,-  209.864.070,- | 1.200.000,-  5.287.104,14,-  338.011.945,00,- | |  | Jumlah | 220.821.725,84,- | 344.499.049,14,- | | | | | | | |
|  | Jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.220.821.725,84  yang terinci sebagai berikut :   1. Beban Dibayar Dimuka   Rp. 5.282.655,84 adalah saldo Asuransi UPTD Jetis per 31 Desember 2020. Pada tahun 2019 tedapat saldo Rp. 5.287.104,14 kemudian terjadi penambahan sejumlah 6.911.000 di Bulan Oktober dikarenakan Kontrak Asuransi Resiko Khusus Pasar berlaku dari Bulan Oktober 2019 sampai Bulan Oktober 2020. Sehingga di Bulan Oktoer 2020 terjadi penambahan untuk periode 2020-2021. Pengurangan sebesar Rp. 6.915.448,30 dari Kontrak periode 2019-2020.   1. Persediaan   Rp. 209.864.070,00 | | | | | |
|  | Jumlah nilai persediaan per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2019 | | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. | Alat Tulis Kantor  Cetak  Alat Listrik  Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih  Bahan Pakai Habis Kesehatan Medis  Bahan Pakai Habis Kesehatan Non Medis  Bibit Tanaman  Bibit Ternak  Bahan Obat - obatan  Bahan Makanan Pokok  Bahan Pakan Ternak | 3.875.120,-  16.657.000,-  56.000,-  30.000,-  2.437.950,-  495.000,-  7.580.000,-  7.240.000,-  137.792.000,-  21.202.500,-  12.498.500 | 8.839.445,-  30.639.100,-  354.000,-  135.000,-  2.960.900,-  535.000,-  6.160.200,-  18.420.000,-  249.398.800,-  0,-  20.569.500,- | |  | Jumlah | 209.864.070,- | 338.011.945,- | | | | | | |
|  | Jumlah persediaan per 31 Desember 2020 sejumlah Rp. 209.864.070,- mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 338.011.945,-  .   * 1. **Aset Tetap ........................................................................................ Rp.** 55.316.807.186,72   Aset Tetap per 31 Desember 2020 digambarkan sebagai berikut :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2019 | | 1.  2.  3.  4.  5.  6. | Tanah  Peralatan dan Mesin  Gedung dan Bangunan  Jalan, Irigasi dan Jaringan  Aset Tetap Lainnya  Akumulasi Penyusutan | 16.018.595.783,-  19.027.710.339,-  46.680.658.330,04,-  12.996.189.683,96,-  963.770.725,-  (40.370.117.674,28) | 14.096.595.783,00  18.887.218.114,-  46.868.020.201,00  12.614.981.284,-  1.057.740.350,00  (37.490.020.459,52) | |  | Jumlah | 55.316.807.186,72,- | 56.034.535.272,48,- |   Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 55.316.807.186,72 mengalami penurunan sebesar dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 56.034.535.272,48 dengan rincian sebagai berikut :   * + 1. Tanah .............................................................................. Rp. 16.018.595.783  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2019 | | 1.  2.  3.  4.  5. | Kolam Ikan  Tanah Pertanian  Tanah Untuk Bangunan Gedung  Tanah Persil  Tanah Non Persil | 0,00  0,00  0,00  9.947.815.333,00  6.070.780.450,00 | 0,00  4.148.780.450,00  9.947.815.333,00 | |  | Jumlah | 16.018.595.783,00 | 14.096.595.783,00 |   1.2.2 Peralatan dan Mesin .......................................................... Rp. 18.887.218.114,00   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2019 | | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. | Alat Besar  Alat Angkutan  Alat Alat Bengkel dan alat Ukur  Alat Pertanian  Alat Kantor dan Rumah Tangga  Alat Studio, Komunikasi, Pemancar  Alat Kedokteran dan Kesehatan  Alat Laboratorium  Alat Persenjataan  Komputer  Alat Keselamatan Kerja | 775.167.492,00  5.259.489.183,00  821.004.707,00  4.052.945.438,00  3.496.215.441,00  375.146.062,00  584.081.188,00  1.456.640.771,00  393.534,00  2.158.719,00  29.090.208,00 | 764.167.492,00  5.208.299.183,00  793.544.707,00  4.035.919.438,00  3.528.548.741,00  378.285.062,00  584.081.188,00  1.398.795.771,00  393.534,00  2.166.092.790,00  29.090.208,00 | |  | Jumlah | 19.008.893.814,- | 18.887.218.114,- |   Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 19.008.893.814,- mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 18.887.218.114,-   * + 1. Gedung dan Bangunan .............................................................. Rp. 46.680.658.330,04  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2019 | | 1.  2. | Bangunan Gedung  Tugu Titik Kontrol/pasti | 46.512.898.330,04,-  167.760.000,- | 46.700.260.201,-  167.760.000,- | |  | Jumlah | 46.680.658.330,04,- | 46.868.020.201,- |   Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 46.680.658.330,04,- mengalami peningkatan sebesar dari realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 46.868.020.201,-   * + 1. Jalan, Irigasi dan Jaringan ....................................................... Rp. 12.996.189.683,96,00  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2019 | | 1.  2.  3.  4. | Jalan dan Jembatan  Bangunan Air  Instalasi  Jaringan | 1.214.979.178,-  11.174.069.705,96,-  360.582.800,-  246.558.000,- | 1.172.779.178,-  11.048.268.706,-  363.668.400,-  30.265.000,- | |  | Jumlah | 12.996.189.683,96,- | 12.614.981.284,- |   Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 12.996.189.683,96,- mengalami peningkatan sebesar dari realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 12.614.981.284,-   * + 1. Aset Tetap Lainnya .................................................................... Rp.18.367.129.066,67  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2019 | | 1.  2. | Aset Tidak Berwujud  Aset Lain lain | 23.320.000,-  18.343.809.066,67,- | 26.235.000,-  17.539.169.066,67,- | |  | Jumlah | 18.367.129.066,67,- | 17.565.404.066,67,- |   Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 18.367.129.066,67,- mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 17.565.404.066,67,-   * + 1. Akumulasi Penyusutan ........................................................... Rp. (40.323.021.955,28)  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 | | 1.  2.  3.  4. | AP Peralatan dan Mesin  AP Gedung dan Bangunan  AP Jalan,Irigasi dan Jaringan  AP Aset Tetap Lainnya | (10.370.767.244,04) (20.697.969.896,93)  (9.019.264.934,31)  (235.019.880) | (9.514.250.375,47)  (19.387.521.141,88)  (8.356.294.822,17)  (231.954.120,00) | |  | Jumlah | (40.323.021.955,28) | (37.490.020.459,52) |   Jumlah Akumulasi Penyusutan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. (40.323.021.955,28) mengalami peningkatan dibanding dengan realisasi tahun 2019 adalah sebesar Rp. (37.490.020.459,52)   * 1. **Aset Lainnya ........................................................................................... Rp.** 17.565.404.066,67   Aset Tetap per 31 Desember 2019 digambarkan sebagai berikut :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 | | 1.  2. | Aset Tidak berwujud  Aset Lain - Lain | 26.235.000,-  17.539.169.066,67,- | 0,-  17.706.319.066,67,- | |  | Jumlah | 17.565.404.066,67,- | 17.706.319.066,67,- |   Terdapat perbedaan pencatatan pada Neraca 2019 dengan KIB 2019 pada aset lain lain sebagai berikut:  **5.2.2 KEWAJIBAN**  Kewajiban per 31 Desember 2020 digambarkan sebagai berikut ;   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2019 | | 1.  2. | Pendapatan Diterima Dimuka  Utang Belanja | 2.617.499,12  23.461.748,00 | 11.391.815,94  5.479.003,00 | |  | Jumlah | 26.079.247,12 | 16.870.818,94 |   Jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 26.079.247,12 mengalami peningkatan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 16.870.818,94  **5.2.3 EKUITAS DANA**  Ekuitas Dana pada akhir Desember 2020 adalah sebesar Rp. 73.926.957.926,11 mengalami penurunan dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 73.927.567.569,35  **5.3 PENJELASAN POS-POS LO**  Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan suplus/deficit dari operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.  Reviu atau laporan operasional pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang untuk tahun buku yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat beberapa hal yang terungkap:  Penjelasan Pos Pos LO:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2020 | 2019 | | 1. | Pendapatan retribusi daerah | 2.898.341.416,82,- | 2.573.352.783,12,- | | 2. | Lain lain PAD yang sah | 350.499.000,- | 291.823.000,- | | 3. | Pendapatan Hibah | 44.110.000,- | 10.000.000,- | | 4. | Pendapatan Lainnya | 804.640.000,- | 8.780.000,- | | 5. | Surplus Penjualan Aset Non Lancar | 0,- | 0,- | | 6. | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0,- | 760.200.000,- | | 7. | Beban Pegawai | 15.936.417.246,- | 18.066.800.283,- | | 8. | Beban Barang dan Jasa | 9.173.175.157,3,- | 9.814.538.545,65,- | | 9. | Beban Hibah | 24.407.799.594,- | 32.763.619.369,- | | 10. | Beban penyusutan dan amortisasi | 3.259.531.962.76,- | 3.382.695.881,68,- | | 11. | Beban luar biasa | 376.060.965,- | 0,- |   8.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2020 | 2019 | | 1. | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 1.489.320.716,82,- | 31.125.000,- | | 2. | Retribusi Pelayanan Persampahan | 0,- | 12.000,- | | 3. | Retribusi Pelayanan Pasar | 0,- | 1.268.744.233,12,- | | 4. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 283.016.200,- | 347.875.350,- | | 5.  6. | Retribusi Tempat Khusus Parkir  Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 673.882.000,-  193.372.100,- | 569.578.000,-  211.484.500,- |   8.1.4 Lain Lain PAD yang Sah   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2020 | 2019 | | 1. | Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum | 37.304.000,- | 33.673.000,- | | 2. | Lain lain PAD yang Sah | 313.195.000,- | 258.150.000,- |   8.3.1 Pendapatan Hibah   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2019 | 2018 | | 1. | Pendapatan Hibah dari Pemerintah | 44.110.000,- | 10.000.000,- | |  |  |  |  |   8.3.3 Pendapatan Lainnya   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2019 | 2018 | | 1. | Pendapatan Lainnya | 804.640.000,- | 8.780.000,- | |  |  |  |  |   8.4.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2020 | 2019 | | 1. | Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya | 0,- | 760.200.0005,- | |  |  |  |  |   9.1.1 Beban Pegawai   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2020 | 2019 | | 1. | Beban Gaji dan tunjangan | 11.945.162.281,- | 13.024.154.475,- | | 2. | Beban Tambahan Pengahasilan PNS | 3.888.929.311,- | 4.901.112.500,- | | 3. | Insentif Pemungutan retribusi daerah | 7.092.254,- | 27.764.308,- | | 4. | Honorarium PNS | 33.200.000,- | 39.700.000,- | | 5. | Honorarium Non PNS | 31.220.000,- | 47.170.000,- | | 6. | Uang Lembur | 26.113.400,- | 26.899.000,- | | 7. | Uang saku piket lebaran | 4.700.000,- | 0,- |   9.1.2 Beban Barang dan Jasa   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2020 | 2019 | | 1. | Beban Habis Pakai | 563.357.147,- | 610.356.644,- | | 2. | Beban Persediaan Bahan/Material | 1.257.603.450,- | 1.315.880.164,- | | 3. | Beban Jasa Kantor | 4.479.167.657,- | 4.162.672.227,- | | 4. | Beban Premi Asuransi | 127.060.232.3,- | 96.694.837,65,- | | 5. | Beban Perawatan Kendaraan bermotor | 210.921.346,- | 203.694.225,- | | 6. | Beban Cetak dan Penggandaan | 176.048.000,- | 236.463.100,- | | 7. | Beban Sewa Rumah/gedung/Gudang/Parkir | 131.000.000,- | 172.849.089,- | | 8. | Beban Sewa Sarana Mobilitas | 49.908.000,- | 56.700.000,- | | 9. | Beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor | 420.000,- | 19.470.000,- | | 10. | Beban makanan dan minuman | 628.725,800,- | 845.621.800,- | | 11. | Beban Pakaian Dinas dan atributnya | 96.090.000,- | 160.033.000,- | | 12. | Beban Pakaian Kerja | 36.986.000,- | 38.910.000,- | | 13. | Beban Pakaian Khusus dan hari hari tertentu | 3.900.000,- | 11.490.000 | | 14. | Beban Perjalanan Dinas | 872.805.525,- | 1.450.954.489,- | | 15. | Beban Pemeliharaan | 390.353.000,- | 135.151.800,- | | 16. | Beban Jasa konsultasi | 0,- | 104.697.170,- | | 17. | Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis | 12.714.000,- | 13.800.000,- | | 18. | Beban Honorarium Non Pegawai | 128.115.000,- | 142.950.000,- | | 19. | Uang untuk diberikan pada pihak ketiga | 8.000.000,- | 36.150.000,- | |  |  |  |  |   9.1.5 Beban Hibah   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2020 | 2019 | | 1. | Beban Hibah Pada Kelompok masyarakat | 0,- | 0,- | | 2. | Beban Hibah barang untuk diserahkan pada kepada masyarakat | 24.407.799.594,- | 32.763.619.369,- |   9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2020 | 2019 | | 1. | Beban Penyusutan Peralatan dan mesin | 918.224.675,57,- | 936.562.255,38,- | | 2. | Beban Penyusutan Gedung | 1.672.356.415,05,- | 1.677.956.429,83,- | | 3. | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi | 662.970.112,14,- | 755.702.536,47,- | | 4. | Beban Penyusutan Aset | 3.065.760,0,- | 11.017.160,0,- | | 5. | Beban Amortisasi Aset tak berwujud | 2.915.000,- | 1.457.500,- |   9.1.9 Beban Luar biasa   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2020 | 2019 | | 1. | Beban Lain | 0,- | 0,- | | 2. | Beban Luar Biasa | 376.060.965,- | 46.276.500,- |   **5.4 PENJELASAN POS-POS LPE**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2020 | 2019 | | 1. | Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar | (0) | (0) | | 2. | Ekuitas awal | (207.198.093.403,37) | (60.429.774.796,21) | | 3.  4. | Surplus/Defisit  RK PPKD | (49.055.394.508,24)  330.180.445.837,72 | (60.429.774.796,21)  281.125.660.972,72 | |  | Jumlah | 73.926.957.926,11 | 73.927.567.569,35 | | | | | | |
|  |  | | | | | |

**BAB VI**

**PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN**

A. ORGANISASI

Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang adalah Dinas yang terbentuk berdasarkan pada Perda Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan serta bidang pertanian sub bidang peternakan. Adapun susunan organisasi Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

* + - Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan
* Sekretariat Dinas yang terdiri dari :

- Sub Bagian Perencanaan

- Sub Bagian Keuangan

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

* Bidang Pertanian

- Seksi Hortikultura dan Pengembangan Usaha Pertanian

- Seksi Tanaman Pangan

- Seksi Organisme Pengganggu Tanaman dan Pengelolaan Lahan dan Air Pertanian

Tanaman Pangan

* Bidang Perkebunan

- Seksi Tanaman Tahunan

- Seksi Tanaman Semusim

- Seksi Organisme Pengganggu Tanaman, Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Pengembangan Usaha Perkebunan

* Bidang Peternakan yang terdiri dari :

- Seksi Perbibitan

- Seksi Budidaya

- Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak

* Bidang Kesehatan Hewanyang terdiri dari :

- SeksiPencegahan, Pengamanan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

- Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan

- Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

* Bidang Perikanan yang terdiri dari :

- Seksi Perikanan Budidaya

- Seksi Perikanan Tangkap

- Seksi Pengembangan Usaha Perikanan

* Bidang Pangan yang terdiri dari :

- Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- Seksi Distribusi Pangan

- Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

* Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari :

- UPTD Perbibitan Pertanian

- UPTD Terminal Agribisnis

- UPTD Balai Benih Ikan

- UPTD Puskeswan, RPH dan Pasar Hewan

* Kelompok Jabatan Fungsional

**B. STRUKTUR KEPEGAWAIAN/ SUMBER DAYA MANUSIA**

Dinas Peternakan Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang di dukung dengan SDM sebanyak 363 yang terdiridari 168 orang PNS , 63 Orang THL-TBPP, 9 Orang THL Perkebunan, 3 Orang THL Perikanan, 4 Orang THL Pusat dan 116 orang Tenaga Harian Lepas (tenaga BBI, tenaga Puskeswan, tenaga RPH,tenaga BPP, UPTD dan tenaga kantor). Untuk rincian pegawai berdasarkan golongan dan eselon sebagai berikut :

**Tabel Jumlah Pegawai Per Desember 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOLONGAN** | **ESELON** | | | | **NON ESELON** | | **TOTAL** |
| **II** | **III** | **IV** | **V** | **FUNGSIONAL** | **STAF** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV/e | - | - | - | - | - | - | - |
| IV/d | - | - | - | - | - | - | - |
| IV/c | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| IV/b | - | 5 | - | - | 4 | 1 | 10 |
| IV/a | - | - | - | - | 10 | 4 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH | 1 | 5 | - | - | 14 | 5 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| III/d | - | - | 20 | - | 14 | 3 | 37 |
| III/c | - | - | 4 | - | 12 | 4 | 20 |
| III/b | - | - | - | - | 7 | 12 | 19 |
| III/a | - | - | - | - | 13 | 8 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH | - | - | 24 | - | 46 | 27 | 97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| II/d | - | - | - | - | 0 | 9 | 10 |
| II/c | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| II/b | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| II/a | - | - | - | - | 15 | 2 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH | - | - | - | - | 15 | 26 | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| I/d | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| I/c | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| I/b | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| I/a | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harian Lepas | - | - | - | - | - | 116 | 116 |
| THL | - | - | - | - | - | 79 | 79 |
| JUMLAH | - | - | - | - | - | 195 | 195 |
| TOTAL | 1 | 5 | 24 | - | 75 | 258 | 363 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ungaran, 31 Desember 2020  Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan  Kabupaten Semarang  Selaku  Pengguna Anggaran  **Ir. Wigati Sunu, MBA**  Pembina Utama Muda  NIP 19640106 199103 1 006 |

**BAB VII**

**PENUTUP**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 untuk dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selain Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Operasional yang semuanya merupakan satu kesatuan pelaksanaan APBD selama kurun waktu 2020.

Berdasarkan Laporan Keuangan OPD Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang Tahun 2020 maka informasi yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi LRA Tahun Anggaran 2020 pada pos Pendapatan sebesar Rp. 2.875.010.150,- Atau mencapai 81.78% dari total anggaran Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 3,515,686.000,- jika dibandingkan dengan realiasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 5,853.733.849,- maka jumlah realisasi untuk tahun anggaran 2020 mengalami penurunan. Begitu juga untuk Pos Belanja realisasi sebesar Rp. 62,801.858.885,- mencapai 94.29% dari total anggaran Rp. 66.602.471.000,-.mengalami penurunan dari tahun 2019 yang sebelumnya sebesar Rp. 66.753.107.548,-.
2. .Realisasi Belanja Operasional Tahun Anggaran 2020 untuk pendapatan Rp. 3.644.155.783,12,- mengalami penurunan dari tahun 2019 Rp. 6.837.929.455,03,- sebesar 87.64% atau senilai Rp. 3.193.773.671,91,-
3. Jumla surplus/defisit Rp. 59.926.848.735,- atau sebesar 94.99% dari total Angaran Sebesar Rp. 63.086.785.000,-.
4. Jumlah Aset per 31 Desember 2020 Rp. 73.944.438.388,29,- mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp. 75.297.931.238,69,-.
5. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah Rp. 73.927.567.569,35,- mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp. 75.289.213.906,63,-
6. Jumlah Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2020 Rp. 18.066.800.283,-
7. Jumlah Beban per 31 Desember 2020 Rp. 64.073.930.579,33,-
8. Jumlah Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah Sebesar Rp.73.927.567.569,35

Demikian Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Neraca serta Catatan atas Laporan Keuangan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ungaran, 31 Desember 2020  Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan  Kabupaten Semarang  Selaku  Pengguna Anggaran  **Ir. Wigati Sunu, MBA**  Pembina Utama Muda  NIP 196401061991031006 |

NOTE: beberapa penjelasan pada pos penjelasan LRA.. LO dan LPE berasal dari review inspektorat